

# PENGARUH FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Savita Fintari

Universitas Terbuka, Indonesia  
savitafintari@gmail.com

Submitted: 8 Juli 2020  
Revised: 17 Agustus 2020  
Accepted: 10 November 2020

## **ABSTRACT**

*The paper aimed to analyze the influence of the flypaper effect on general allocation funds (DAU) to the financial performance in Bima, West Nusa Tenggara province. Variables used in this research were the general allocation fund (DAU) as independent variabel and the financial performance of local government as dependent variable. This research used a quantitative method. Census was conducted in Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bima. The data was analyzed using SPSS version 16.0. The finding of the study showed that the flypaper effect of the general allocation funds and the financial performance of local government had a negative and significant relation. The influence of general allocation funds to the financial performance of local government in Bima was 41.2% and the rest 58.8% was the changing of financial performance of local government caused by another variable which was not examined.*

**Keywords:** *Influence, flypaper effect, unconditional grants, the financial performance of local government*

## **PENDAHULUAN**

Sejatinya implementasi otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan kesjahteraan masyarakat, meringankan beban pemerintah pusat serta memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan potensi sumber daya alam dan masyarakat di daerah. Sehingga pelaksanaan otonomi daerah memerlukan pembiayaan yang cukup besar dan sudah seharusnya dipikul serta menjadi tanggung jawab daerah sehingga daerah tidak dapat lagi berpangku tangan hanya mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Pada kenyataannya PAD di kota dan kabupaten tidak cukup mendanai kebijakan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan APBD di kota/ kabupaten 80 persen merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Artinya hanya 20 persen APBD berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mayoritas dana harus disuplai

dari pusat. Ini juga menunjukkan bahwa skala ekonomi jelas tidak baik di kota dan kabupaten. Belum lagi belanja di tingkat di kota dan kabupaten sekitar 70-80 persen ditujukan untuk belanja pegawai. Artinya, hanya 20 persen untuk belanja publik atau infrastruktur (Kurnia, 2013).

Fenomena yang timbul dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia salah satunya adalah berupa ketergantungan yang tinggi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini jelas tergambar pada nilai transfer DAU yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah lebih tinggi dan kurang memperhatikan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki pemerintah daerah. Akibatnya pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang besar dari pemerintah pusat dan bukan memaksimalkan kapasitas fiskal daerah (potensi fiskal). Ketergantungan ini

terjadi saat pemerintah merespon belanja lebih banyak atau boros dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diproyeksikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diproyeksikan dengan PAD. Maka, fenomena tersebut disebut dengan flypaper effect (Maimunah, 2006).

Ironisnya, alokasi dana transfer ke daerah kabupaten/kota pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal sehingga penerimaan pendapatan asli daerah pada lahan pajak menjadi kurang. Transfer pemerintah pusat yang khususnya didominasi oleh transfer tak bersyarat (Unconditional Grant) yaitu DAU dan DBH juga masih berpengaruh dalam pengeluaran dan belanja pembangunan yang ada di Kota Bima. Hal ini ditandai dengan tingginya porsi penerimaan transfer tak bersyarat (Unconditional Grant) dari pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer bersyarat (Conditional Grant) atau pendapatan lain-lainnya. Terbukti dengan proporsi PAD, DAU dan pendapatan lain-lain yang sah Pemerintah Kota Bima Tahun 2015 – 2017 di tunjukkan pada Tabel 1.

Berdasarkan pada table 1 di atas, diketahui bahwa komposisi pendapatan Kota Bima Tahun 2015 – 2017 secara umum cenderung menunjukkan terjadinya peningkatan dan pendapatan Kota Bima didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan. Pada tahun 2015, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan sebesar 552.406 Milyar dan meningkat dari tahun ke tahun sampai pada tahun 2017. Dengan kenaikan sebesar 5% pada tahun 2014, lalu pada tahun 2016 dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 18% kemudian pada Tahun 2017 meningkat sebesar 26% sementara porsi terbesar pada dana perimbangan dipemerintah Kota Bima adalah dana alokasi umum. Jelas tergambar pada tabel diatas dana alokasi umum dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 3,86%. Hal serupa dinyatakan oleh (Sidiq, 2016) “Disaat transfer yang diperoleh besar maka pemerintah daerah berusaha agar periode berikutnya transfer yang diperoleh tetap besar sehingga transfer meningkat ditahun berikutnya”.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk perbandingan mengenai pendapatan daerah dan

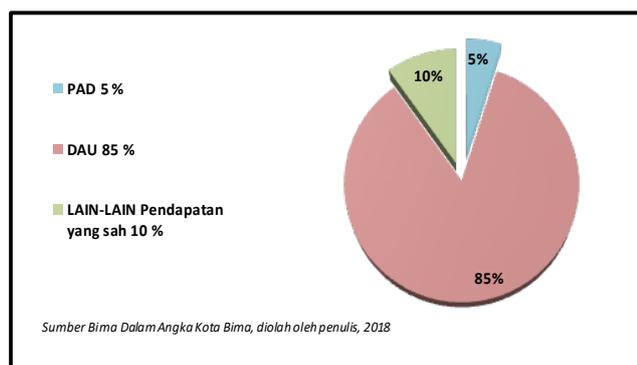
Tabel 1. Komposisi Pendapatan Daerah Kota Bima T.A 2015 – 2017  
(dalam milyaran)

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2018

Jenis Pendapatan Daerah <i>Source of Revenues</i>	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>30 266 723</b>	<b>30 524 800</b>	<b>52 465 170</b>
1.1 Pajak Daerah	11 228 423	12 341 770	13 910 270
1.2 Retribusi Daerah	5 268 429	5 132 142	5 048 756
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 225 903	1 678 677	2 059 377
1.4 Lain-lain PAD yang sah	12 543 968	11 372 211	31 446 765
<b>2. Dana Perimbangan</b>	<b>552 406 937</b>	<b>698 913 856</b>	<b>707 754 462</b>
2.1 Dana Alokasi Umum (DAU)			
2.1 Dana Alokasi Khusus (DAK)	435 279 239	464 125 442	455 972 250
2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)	98 875 020	172 662 913	193 166 068
	15 315 441	15 743 067	58 616 143
<b>3. Lain-Lain Pendapatan yg sah</b>	<b>128 034 579</b>	<b>51 645 503</b>	<b>213 422 769</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	12 000 000	168 997 000
3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
3.1 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	29 631 422	31 011 604	36 619 697
3.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	98 403 157	5 000 000	7 500 000
	0	3 633 900	0

transfer dari pemerintah pusat maka perhatikan grafik perbandingan pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima yang akan ditampilkan pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Perbandingan Unsur Pendapatan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) T.A 2015-2017



Gambar diatas menunjukkan bahwa Kota Bima tergolong daerah yang relatif kurang mandiri dan masih bergantung pada pemerintah pusat dalam hubungan finansial. Hal ini ditandai dengan adanya dominasi dana perimbangan yaitu sebesar 85 % pada penerimaan pendapatan daerah Kota Bima dari pada PAD yang hanya menyumbang 5 % saja. Gambaran proporsi diatas menunjukkan adanya indikasi terjadinya flypaper effect. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Flypaper Effect Pada pada Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)”.

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui apakah flypaper effect terjadi di Kota Bima.
2. Untuk mengetahui apakah flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh

flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima.

## Kajian Literatur dan Teori

Menurut Sukriy dan Halim (2003), definisi flypaper effect merupakan respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Menurut Maimunah (2006) flypaper effect merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah merespon belanja lebih banyak atau boros dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diproyeksikan dengan DAU (Dana Alokasi Umum) daripada menggunakan kemampuan sendiri, diproyeksikan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Kuncoro (2007) mendefinisikan flypaper effect adalah gejala dimana transfer meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi tidak menjadi substitusi bagi pajak daerah. Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan flypaper effect merupakan suatu kecenderungan pemerintah daerah merespon belanja lebih besar pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat daripada pendapatan daerahnya sendiri. Dalam hal ini, pemerintah cenderung boros pada dana transfer tidak bersyarat yang khususnya pada Dana Alokasi Umum (DAU) daripada pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sendiri.

## Transfer

### a. Transfer Bersyarat

Menurut Shah (1991:4), conditional grants dimaksudkan untuk menyediakan insentif pemerintah untuk menjalankan program atau aktifitas tertentu. Transfer (grants) ini dapat diberikan secara berkala atau sesuai mandat yang diberikan atau dapat digunakan sewaktu-waktu (ad hoc). Transfer bersyarat (conditional grants) secara tipikal menentukan jenis pengeluaran yang akan dibiayai berdasarkan kondisi tertentu. Menurut Azwardi (2007), transfer bersyarat di Indonesia biasanya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Conditional grants terdiri dari

bantuan penyeimbang (matching grants) dan bantuan bukan penyeimbang (non-matching grants).

**b. Transfer Tidak Bersyarat**

Transfer tidak bersyarat (Unconditional grants) yang sering disebut dengan bantuan tak bersyarat menurut (Azwardi, 2007:4) di Indonesia berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut koleman (1996) dalam Purnomo (2011), Transfer Tidak Bersyarat (Unconditional Grants) merupakan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa persyaratan tertentu dan pada umumnya transfer ini diberikan kepada pemerintah pusat yang berkaitan dengan usaha-usaha produktif untuk peningkatan investasi pada badan usaha yang ada di daerah.

**Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Syafri (2008:213) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Selanjutnya pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan dari sebuah aktivitas dari proses suatu unit organisasi.

Salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126). Adapun analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio ketergantungan.

**Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Halim (2007:150) bahwa “membagi rasio kedalam beberapa kelompok rasio yang dapat dijadikan tolak ukur menilai kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersumber dari APBD”. Antara lain, adalah:

**a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)**

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah. Adapun Formula untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut (Halim, 2004:150) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Dengan melihat tingkat dan pola hubungan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

**b. Rasio Efektifitas terhadap Penapatan Asli Daerah (PAD)**

Rasio efektivitas terhadap PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang riil Halim (2007:234). Untuk mengukur rasio efektivitas PAD ini dapat menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Dengan kriteria efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan  
Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Presentase Efektifitas	Pola Hubungan
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

### c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan adalah rasio yang digunakan ketika ingin melihat seberapa besarkah tingkat ketergantungan pemerintah daerah dalam menggunakan dana-dana yang diberikan pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan daerah dapat diukur dengan rasio antara total penerimaan daerah dengan total Dana Perimbangan. Untuk menghitung rasio ketergantungan keuangan daerah dapat menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Dana Transfer}} \times 100\%$$

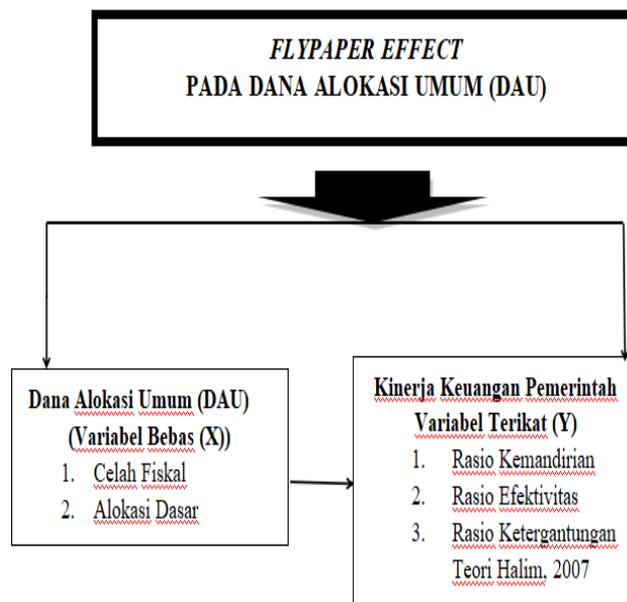
Kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

### Kerangka Analisis



Gambar 2. Kerangka Analisis

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima yang merupakan salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen yang mana dalam penelitian ini DAU menjadi variabel independen dan kinerja keuangan pemerintah merupakan variabel dependen. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma sederhana.

Metode pengumpulan data menggunakan berbagai sumber data yaitu data primer dan data skunder yaitu LRA Pemerintah Kota Bima 2015-2017 dan Bima Dalam Angka Tahun 2017. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner secara langsung pada pegawai negeri di BPKAD Kota Bima. Metode analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik deskripsi yang merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden dalam

bentuk keterangan dalam hal ini meliputi karakteristik responden terhadap variabel yang dinilai. Penelitian ini menggunakan uji persyaratan regresi yang meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Dan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dengan variabel dependen maka digunakan analisis regresi linier dengan bantuan program SPSS 16.0 dan panduan analisis Siregar (2013).

## PEMBAHASAN

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian daerah yang bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini pemerintah sangat di tuntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai kebutuhan daerah, pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bima Periode Tahun 2015-2017 ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kota Bima Periode Tahun 2015-2017

Sumber: Data Skunder diolah, 2018

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Penerimaan APBD tanpa subsidi (Rp)	RKKD (%)	Ket
2015	30.266.723	552.406.937	6,95	Instruktif
2016	30.524.800	698.913.856	6,57	Instruktif
2017	52.465.170	707.754.462	11,50	Instruktif

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Kota Bima TA 2015 hingga TA 2017 tergolong rendah dan membentuk pola hubungan "INSTRUKTIF". Hal tersebut jelas terlihat dari persentase rasio kemandirian keuangan Kota

Bima yang tidak pernah lebih dari 10% sehingga belum dapat dikatakan daerah yang mandiri dan belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara financial. Oleh karena itu perlu adanya terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar rasio kemandirian Kota Bima mengalami peningkatan yang signifikan.

#### 1. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target awal yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bima Tahun 2015-2017 ditunjukkan pada tabel 6.

Tabel 6. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2015-2017

Sumber: Data Skunder diolah, 2018

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	RE (%)	Keterangan
2015	30.266.723	28.392.440	106,6	Sangat Efektif
2016	30.524.800	31.100.000	98,1	Cukup Efektif
2017	52.465.170	32.153.669	163,1	Sangat Efektif

Berdasarkan perhitungan pada tabel 6 menunjukkan presentase rasio efektifitas Kota Bima mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2016 persentasi rasio efektifitas Kota Bima sebesar 98,1% dan kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 163,1%. Sehingga menurut uraian dan hasil perhitungan rasio efektifitas Kota Bima tergolong sangat efektif.

#### 2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan daerah adalah untuk mengukur tingkat kemampuan daerah

dalam membiayai aktifitas pembangunan melalui pengoptimalisi PAD, yang mana diukur dengan perbandingan antara PAD dan total penerimaan APBD tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Dari hasil analisis rasio ketergantungan diperoleh data ketergantungan keuangan daerah Kota Bima Tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel 7. Rasio Ketergantungan Keuangan Kota Bima Tahun 2015-2017

Sumber: Data Skunder diolah, 2018

Tahun Anggaran	Dana Perimbangan (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan (%)	Ket.
2015	552.406.937	710.708.239	77,7	Sangat Tinggi
2016	698.913.856	781.084.159	89,4	Sangat Tinggi
2017	707.754.462	973.642.401	72,6	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 7 di atas, rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Bima adalah sebesar 79,9%, sehingga dapat diklasifikasikan menurut kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah adalah sangat tinggi. Terlebih lagi pada tahun 2016, rasio ketergantungan mencapai 89,4% dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp. 146.506.919.000 dari tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Bima sangat Tinggi kepada Pemerintah Pusat.

## Statistik Deskriptif

### 1. Uji Persyaratan Regresi (uji Asumsi Klasik)

#### a. Uji Linieritas

Berdasarkan hasil analisis data uji linieritas dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 for windows dapat diketahui bahwa masing-masing variabel Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan variabel Kinerja

Keuangan Pemerintah Kota Bima penelitian dapat dinyatakan memiliki hubungan yang linier karena nilai signifikan setiap variabel lebih besar ( $>$ ) 0.05.

Tabel 8. Ringkasan Uji Linieritas dengan Program SPSS 16.0 for windows

Sumber: Output SPSS 16.0 tahun 2018

No	Nama Variabel	Jenis Variabel	Signifikan	Keterangan
1	Flypaper Effect	Independen	0.331	Linier
4	Kinerja Keuangan	Dependen	0.514	Linier

Berdasarkan nilai signifikansi dari output diatas, diperoleh nilai signifikansi flypaper effect = 0.331  $>$  0.05 dan kinerja keuangan = 0.514  $>$  0.05 menyatakan bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara flypaper effect pada dana alokasi umum dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima.

#### b. Normalitas

Berdasarkan hasil analisis data uji normalitas masing-masing variabel penelitian dengan mengamati taraf signifikan masing-masing variable penelitian maka dinyatakan data berdistribusi normal sebagaimana yang tercantum dalam table ringkasan hasil uji normalitas di bawah ini:

Tabel 8. Ringkasan Uji Normalitas Data Penelitian

Sumber: output SPSS 16.0 for windows, 2018

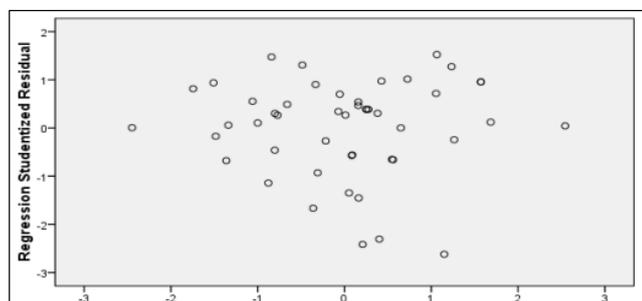
Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Flypaper Effect	.320	74	.091	.653	74	.762
Kinerja Keuanga n	.513	74	.074	.752	74	.411
a. Lilliefors Significance Correction						
Sumber: output SPSS 16.0 for windows, 2018						

Berdasarkan Hasil Uji Normalitas Data diatas, diketahui nilai signifikan sebesar 0.091 dan yang lebih besar dari 0.05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang diuji adalah berdistribusi normal.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam data penelitian. Jelas tergambar pada gambar 2, dapat dinyatakan bahwa model atau data penelitian ini menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi karena tidak ada pola yang jelas, serta tergambar titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Gambar 2. Grafik Hasil Uji Heterokedastisitas



4. Hasil Uji Analisis Regresi

Upaya mencari hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen (jika X, maka Y) dengan kata lain apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen, maka dilakukan analisis statistik inferensial dengan teknik analisis regresi linier sederhana. Berikut hasil analisis data akan ditampilkan di bawah ini.

Model	R	R Square	Sig.
1	-0.642 <sup>a</sup>	0.412	0.00

**Model Summary**

a. Predictors: (Constant), Kinerja Keuangan  
 Sumber: output SPSS 16.0 for windows, 2018

Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat diketahui bahwa nilai (R) sebesar -0.642 atau 41,2% dalam artian bahwa ada Pengaruh negatif Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima. Jika flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima akan menurun sebesar 0.642. Artinya semakin tinggi Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) maka menyebabkan semakin rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bima.

Dari Tabel Model Summary diatas, diketahui R Square terdapat angka 0.412 artinya bahwa Flypaper effect pada dana alokasi Umum (DAU) memberi kontribusi sebesar 0.412 (0.412 x 100% = 41.2%) atau berkontribusi sebesar 41.2% terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bima, sedangkan sisanya sebesar 58.8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

5. Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain apakah hipotesis penelitian yang telah diajukan oleh peneliti sebelumnya pada Bab II dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0, sehingga diketahui Sig. 0.00 < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa hipotesis alternatif (Ha) yang mengatakan “Ada Pengaruh Signifikan Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima” dapat diterima sebaliknya hipotesis nihil (Ho) ditolak.

Kondisi terjadinya flypaper effect di suatu daerah ditunjukkan ketika tingkat ketergantungan daerah yang tinggi terhadap alokasi dana perimbangan yang di berikan oleh pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi flypaper effect pada Dana Alokasi Umum di Pemerintah Kota Bima. Hai

ini terbukti dengan besaran koefisien DAU dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian adanya hasil dari perhitungan rasio kemandirian keuangan Daerah Kota Bima yang membentuk pola hubungan Intruktif yaitu pola dimana daerah masih belum mandiri yang mengandalkan dana transfer untuk memenuhi kebijakan kesejahteraan masyarakat, dan hasil rasio ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Bima yang cenderung sangat tinggi dengan besaran nilai 79,9%.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa variable flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dibuktikan melalui nilai sig.  $0.00 < 0.05$  dan pengaruh tersebut bersifat negative dibuktikan melalui R (correlation) sebesar -0.641. artinya bahwa semakin tinggi tingkat flypaper effect menunjukkan semakin rendah tingkat kinerja keuangan. Setiap kali kenaikan 1 (satu) satuan nilai koefisien flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) maka kinerja keuangan daerah Kota Bima mengalami penurunan 0.641. Dengan artian jika tingginya Flypaper effect pada (DAU) maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bima.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada teori-teori dan hasil analisis serta pembahasan mengenai pengaruh flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bima, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi flypaper effect di Kota Bima, yang dilihat dari besaran koefisien DAU dibandingkan koefisien PAD Kota Bima. Hal ini ditunjukkan oleh terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel flypaper effect pada DAU terhadap variabel kinerja keuangan. Hal ini berarti, semakin tinggi Flypaper effect pada DAU maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah Kota Bima. Flypaper effect menyebabkan rendahnya kemandirian daerah dan selalu bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah

pusat dianggap sebagai “the power of donatur”, membuat pemerintah Kota Bima terkesan manja dalam membiayai dirinya sendiri dalam artian tidak antusias dalam pengoptimalisasi pendapatan asli daerah.

Ada pun saran yang dapat disampaikan adalah perlunya meningkatkan efektifitas dan efesiensi sertalebih berinovasi dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan perolehan PAD melalui dana transfer berupa DAU. Pemerintah pusat, perlu lebih mendorong pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik agar tidak terjadi flypaper effect di kabupaten/kota di Indonesia. Ada baiknya pemerintah pusat membuat rekapitulasi pertahun daerah-daerah mana saja yang DAU tiap tahunnya meningkat dan diberikan teguran atau sanksi. Dengan begitu pemerintah daerah akan berusaha menekan tingginya DAU sehingga akan berusaha meningkatkan PAD, perlunya sosialisasi bahwa hakikat DAU hanya sebagai stimulan bukan sebagai sumber utama penerimaan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy dan Halim, Abdul. 2003. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali”. Simposium Nasional Akuntansi VI, Yogyakarta, Hal 1140-1159.
- . 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- . 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Azwardi. 2007. The Impact of Fiscal Desentralization on Interregional economic Performance in Indonesia:Fiscal Decentralization. UI-Depok.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama Salemba empat, Jakarta.

- Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X, UNHAS Makasar, 26-38 Juli 2007.
- Kurnia, Eka Daddy. 2013. "Analisis Flypaper effect Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi kasus pada kabupaten/kota di Jawa Timur)". Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Mutiara, Maimunah. 2006. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Purnomo, Hermawan Bayu. 2011. "Flypaper Effect Pada Pengeluaran Transfer Tidak Bersyarat dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/kota di Kalimantan Tahun 2007-2010". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Bandung.
- Shah, Anwar. 1991, A Practitioner's guide to ingovermental fiscal transfers, Policy Research Working Paper Series, The world Bank.
- Siregar, S. (2013). Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. Dilengkapi dengan perhitungan manual dan aplikasi SPSS Versi 17. PT. Bumi Aksara.
- Syafri, Sofyan. 2008. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta Rajawali Pers.
- Bima Dalam Angka, 2017. Katalog BPS-Bima:1102001.2102
- Sumber Bacaan dari Internet dan Bahan Lainnya**
- Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang Penilaian Kinerja Keuangan.  
[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)